



## Kepatuhan Laporan Keuangan Koperasi di Kalimantan Timur pada SAK ETAP

(Compliance of Cooperative Financial Reports in East Kalimantan with SAK ETAP)

Yuli Wahyuni\*, Danna Solihin, Rina Masithoh Haryadi

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Jl. Ir. H. Juanda, No.80 Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123, Indonesia.

DOI. <https://doi.org/10.61656/ijospat.v1i2.158>

**ABSTRACT:** This research aims to see how the East Kalimantan Police Mobile Brigade Unit Cooperative uses the Non-Accountable Entity Financial Accounting Standards (SAK ETAP) in preparing its 2019 financial reports. This investigation was carried out at the East Kalimantan Regional Police Mobile Brigade Unit Cooperative. The author examines the problem and uses SAK-ETAP to solve the following problems: presentation of statements of financial position, profit/loss, changes in equity, cash flow, and financial statement notes, 2019 disclosures about assets, liabilities, income, expenses, and profit/loss; measurement: historical cost and fair value. The research results show that the 2019 East Kalimantan Regional Police Mobile Brigade Cooperative financial reports and SAK ETAP meet the standards and are in accordance with the Financial Accounting Standards for Non-Accountable Entities (SAK ETAP). However, the 2018 and 2019 financial reports of the East Kalimantan Police Mobile Brigade Unit Cooperative, prepared in conformity with SAK ETAP guidelines, consist of two main components: the balance sheet, which includes six items, and the profit/loss report, which includes two items. However, there are still differences in the data.

**Keywords:** Conformity, Cooperative Financial Statements, SAK ETAP.

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) dalam penyusunan laporan keuangannya tahun 2019. Investigasi ini dilakukan di Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur. Penulis meneliti masalah dan menggunakan SAK-ETAP untuk menyelesaikan masalah berikut: penyajian laporan posisi keuangan, laba/rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan laporan keuangan, pengungkapan tahun 2019 tentang aset, liabilitas, pendapatan, beban, dan laba/rugi; pengukuran: biaya historis dan nilai wajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2019 dan SAK ETAP memenuhi standar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP). Namun, laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kaltim tahun 2018 dan 2019 yang dibuat sesuai dengan pedoman SAK ETAP terdiri dari dua komponen utama: neraca, yang mencakup enam item, dan laporan laba/rugi, yang mencakup dua item. Namun, masih ada perbedaan dalam data.

**Kata Kunci:** Kesesuaian, Laporan Keuangan Koperasi, SAK ETAP.

**Article info:** Received: 25 September 2023; Revised: 15 November 2023; Accepted: 17 November 2023

### Recommended citation:

Wahyuni, Y., Solihin, D., & Haryadi, R. M. (2023). Kepatuhan Laporan Keuangan Koperasi di Kalimantan Timur pada SAK ETAP (Compliance of Cooperative Financial Reports in East Kalimantan with SAK ETAP), *Indonesian Journal of Sustainability Policy and Technology*, 1 (2), pp 112-132.



This is an open access article. *Indonesian Journal of Sustainability Policy and Technology* is a multidisciplinary journal licensed under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, menjaga kelangsungan hidup bisnis adalah penting bagi perusahaan dan koperasi. Mereka akan dapat menghadapi tantangan dunia bisnis dengan cara ini. Salah satu jenis organisasi yang berperan aktif dalam perekonomian rakyat adalah koperasi, yang memiliki landasan hukum di Indonesia. Koperasi di Indonesia didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai badan usaha kelompok yang terdiri dari individu yang berlandaskan badan hukum yang bekerja sesuai dengan prinsip perkoperasian dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi masyarakat dengan asas kekeluargaan. Koperasi didirikan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur, adil, dan maju yang mengacu pada Pancasila dan UUD, serta untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Oleh karena itu, pengelolaan koperasi harus profesional dan benar (Itsnaini, 2021).

Kesehatan perusahaan dapat diukur dari kinerjanya. Kategori koperasi yang sehat di mana semua operasi, termasuk pelaporan keuangan, dilakukan sesuai dengan standar. Akibatnya, bidang akuntansi koperasi sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan manajemen koperasi (Ghofirin, 2020). Oleh karena itu, ketika melihat keuangan koperasi dari sudut pandang akuntansi koperasi, banyak tinjauan dan penelitian yang berfokus pada keuntungan dari setiap usaha dan diharapkan dapat menjadi lembaga yang membantu anggota koperasi. Sisa Hasil Usaha (SHU) dan laba lembaga lain sama pentingnya karena motif keuntungan operasinya. Namun, perkoperasian dan lembaga pembangunan ekonomi lainnya memiliki kedudukan yang sama. Sebagai pelaku ekonomi, koperasi seharusnya dapat berkembang dengan sehat dan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Untuk mencapai tujuan ini, koperasi memerlukan penilaian keuangan yang didasarkan pada akuntansi dan data keuangan yang telah diproses, yang menunjukkan sistem keuangan yang jelas. Informasi ini akan digunakan untuk membuat kebijakan ekonomi yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi.

Dalam pelaksanaannya, koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada akhir periode setahun sekali untuk menilai perkembangan kinerjanya dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan koperasi selama periode tersebut. Selama rapat yang diadakan, dia melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan, termasuk laporan keuangan. Pengelolaan koperasi bertanggung jawab atas masalah keuangan melalui sistem informasi keuangan ini. Pelaporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku (Soesanto & Rita, 2019).

Standar akuntansi koperasi sangat penting untuk menyusun laporan keuangan koperasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua bagian yang terlibat dalam koperasi terkait memahami informasi keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah standar yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk akuntansi koperasi (Sekarwati & Mazidah, 2018). Menurut Pedoman Umum Akuntansi Koperasi, Setiap koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik dalam laporan keuangannya harus mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Koperasi menggunakan SAK ETAP sama seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lainnya (Ayuningtyas, 2023). SAK-ETAP adalah pilihan IAI karena mudah digunakan dan mudah diselenggarakan. SAK-ETAP diharapkan akan membantu koperasi memberikan informasi keuangan yang lebih baik tentang kinerja mereka dalam jangka waktu tertentu. Mengoptimalkan tujuan koperasi untuk pembangunan ekonomi nasional juga (Gulo et al., 2022). Namun, koperasi sering menghadapi masalah saat ini, seperti kekurangan pegawai yang memahami SAK ETAP dan pemerintah yang tidak memberikan sosialisasi yang memadai kepada pengurus koperasi. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan tidak memenuhi persyaratan SAK ETAP (Mursidah & Nasution, 2022).

Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur memiliki banyak keuntungan bagi anggota. Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dibentuk dan dianggotai oleh anggota Polri, PNS, dan THL yang ada di Satuan Brimob Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, baik yang masih aktif maupun yang sudah menjadi MPP. Dengan 540 anggota pada 2018, ekonomi anggota diharapkan meningkat. Studi pendahuluan kondisi sebenarnya menunjukkan bahwa dalam 5 (lima) laporan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dari tahun 2014 hingga 2018, tidak ada laporan arus kas atau promosi ekonomi untuk setiap anggota koperasi. Ternyata dia tidak melaporkan pendapatan masing-masing anggota dalam Laporan Sisa Hasil Usaha. Penilaian buku keuangan masuk dan keluar yang dibuat sesuai SAK ETAP tidak pernah dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur. Padahal, laporan yang dibuat sesuai SAK ETAP penting untuk koperasi untuk meningkatkan penilaian dan memberi anggota kepercayaan pada pelaksanaannya dengan menyimpan dana dalam koperasi terkait untuk

dikelola. Namun, laporan tersebut tidak sesuai dengan SAK ETAP, jadi pertumbuhan koperasi akan terhambat dari segi volume usaha, aset, dan SHU. Fokus penelitian adalah bagaimana SAK ETAP dapat diterapkan pada organisasi publik seperti Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana SAK-ETAP diterapkan pada laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur. Ini dilakukan karena pentingnya SAK-ETAP.

## KAJIAN LITERATUR

### Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola, dan menyajikan data, transaksi, dan kejadian yang berkaitan dengan keuangan sehingga orang yang menggunakannya dapat memahaminya untuk tujuan pengambilan keputusan dan lainnya. *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) dalam [Baridwan \(2018, p. 1\)](#) menjelaskan pengertian akuntansi yaitu:

Akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa. Dengan fungsi yakni tersedianya data berupa angka khususnya mempunyai sifat keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan.

Menurut [Warren et al. \(2017, p. 9\)](#) akuntansi berdefinisi “sebagai informasi data keuangan berbentuk informasi yang sistematis dalam rangka pelaporan informasinya bagi orang-orang yang berkepentingan terhadap kegiatan suatu organisasi.” [Kieso et al. \(2017, p. 4\)](#) mendefinisikan akuntansi berupa “sistem dengan input data / informasi dan output berupa informasi data keuangan berguna untuk pemakan dari dalam organisasi ataupun luar organisasi atau entitas”.

Melalui teori tersebut diketahui akuntansi sebagai informasi dalam bentuk angka dalam bentuk sistem dengan input data atau informasi dan output berupa informasi mengenai aktivitas serta keadaan ekonomi perusahaan serta laporan keuangan berguna untuk pengguna laporan tersebut baik yang berkepentingan dalam perusahaan atau pihak diluar perusahaan. Hal ini mengenai ekonomi dapat teridentifikasi, terukur, terklasifikasi dan terikhtisar pada kegiatan pelaksanaannya bagi penentuan kebijakan yang perlu diputuskan.

Akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi dengan memungkinkan adanya sebuah penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Akuntansi keuangan menurut [Sinarwati et al. \(2013, p. 3\)](#) adalah “akuntansi dengan tujuan utama menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar. Pihak luar adalah pihak–pihak di luar manajemen perusahaan, seperti investor, kreditur, badan pemerintah dan pihak luar lainnya”.

Pengertian akuntansi keuangan menurut [Kieso et al. \(2017, p. 2\)](#) pengertian akuntansi adalah: *Identification, recording, and notification to interested parties of an organization's economic events are the three main components of accounting. To provide a record of financial activities, a company finds and records economic events related to its business activities. Each event is recorded systematically, chronologically, and in currency units. Ultimately, this information is distributed in the form of financial reports or accounting reports to interested parties.*

Identifikasi, pencatatan, dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan tentang peristiwa ekonomi organisasi adalah tiga komponen utama akuntansi. Untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan, perusahaan menemukan peristiwa ekonomi yang terkait dengan kegiatan usahanya dan mencatatnya. Setiap peristiwa dicatat secara sistematis, kronologis, dan dalam satuan mata uang. Pada akhirnya, informasi ini didistribusikan dalam bentuk laporan keuangan atau laporan akuntansi kepada pihak yang berkepentingan. (in Bahasa)

Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa akuntansi keuangan adalah proses dalam menghasilkan dokumen bisnis berupa laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi yang berlaku dan berguna bagi beberapa pihak.

### Pengertian Koperasi

Bagi masyarakat umum koperasi merupakan organisasi yang tidak bertujuan mendapatkan laba, namun menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan akan anggota di koperasi tersebut agar dapat

sejahtera. Pengertian dari koperasi yang disampaikan oleh [Subandi \(2015, p. 19\)](#), “sebagai organisasi yang pendiriannya dilakukan oleh sekelompok orang dengan ekonomi yang terbatas dalam rangka tiap anggota tercapai sejahtera dilihat dari ekonomi”. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1922 yang dikutip oleh [Rudianto \(2019, p. 3\)](#), disebutkan bahwa koperasi ini “sebagai usaha berbentuk badan terdiri atas anggota-anggota memiliki badan hukum yang mana aktivitasnya dilandasi prinsip yang berlaku dalam koperasi dalam rangka peningkatan ekonomi dengan asas bersifat kekeluargaan”. Sedangkan Ikatan Akuntansi Indonesia ([IAI, 2019](#)), “koperasi suatu usaha meliputi kumpulan orang-orang bukan kumpulan modal, artinya aktivitas koperasi harus benar-benar mengutamakan kesejahteraan anggota”.

Disimpulkan koperasi sebagai suatu usaha berbentuk badan yang dibentuk oleh sekelompok orang sebagai anggota dengan ekonomi yang terbatas. Kegiatannya melandaskan prinsip terkait dikoperasi artinya aktivitas koperasi harus benar-benar mengutamakan kesejahteraan anggota.

### Laporan Keuangan

Semua aktivitas perusahaan digambarkan dalam laporan keuangan, yang biasanya dilaporkan atau disajikan dalam bentuk neraca dan laporan laba rugi. Pada akhirnya, para pemakai laporan keuangan menggunakannya sebagai alat informasi untuk membuat kebijakan atau keputusan sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

[Baridwan \(2018, p. 7\)](#) laporan keuangan diartikan sebagai “hasil pencatatan pada kegiatan atau transaksi perusahaan di tahun tertentu.” [Wahyuni et al. \(2016\)](#) menjelaskan “dalam suatu data keuangan yang diinformasikan dalam bentuk pelaporan menjadi beberapa indikator seperti neraca, laba/rugi, berubahnya posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta penjelasan tiapnya”. Kemudian [Harahap \(2017, p. 13\)](#) adalah “proses akuntansi pada hasil akhir meliputi neraca dan laba/rugi serta terdapat laporan pelengkap yakni pelaporan keuntungan yang ditahan serta laporan kas”. Dari penjelasan ini diambil suatu kesimpulan bahwa hal ini sebagai laporan dalam memperoleh dan mengevaluasi jumlah aset atau laba di tahun terkait.

### Standar Akuntansi Koperasi

[Oktaritama & Januarti \(2020\)](#) menjelaskan pedoman koperasi pada awalnya yakni UMKM, BPR dan entitas tanpa akuntabilitas lain sebagainya dalam mempermudah laporan keuangannya, untuk syarat dalam pengajuan kredit, evaluasi kinerja, perhitungan pajak dan lain-lain. Untuk itu, SAK ETAP disahkan tahun 2009 yang mulai berlaku 1 Januari 2011, dimana entitas sebagai ETAP boleh memilih penggunaan PSAK-IRS atau SAK ETAP, jika penggunaan PSAK-IFRS maka tidak dapat lagi digunakan SAK ETAP.

### SAK-ETAP

Menurut [IAI \(2018, p. 1.1\)](#) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan standar untuk cara mengumpulkan dan menyajikan data keuangan yang seragam. Karena SAK dibuat pada tahun 1994, KPAI digantikan oleh PAI periode 1984, yang menerapkan sistem IFRS, IAS, GAAP, dan ETAP. ETAP adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang menerbitkan laporan keuangannya untuk mencapai tujuan umum untuk pemilik dan tidak terlibat dalam manajemen usaha, lembaga kredit, atau kreditur.

### Indikator dan Penerapan SAK-ETAP

Menurut [IAI \(2018, p. 1.2a-1.2b\)](#) mengenai penerapan SAK ETAP dipergunakan bagi entitas tidak akuntabilitas untuk masyarakat umum karena digunakan UKM yang tidak jual beli di pasar saham. Akuntabilitas yang signifikan akan diperoleh entitas yang mengajukan mendaftar pada penerbitan efek, dikuasainya aset untuk fidusia contohnya bank, asuransi, dan lain-lain.

### Kebijakan Akuntansi SAK-ETAP

#### *Pengakuan*

Laporan keuangan dalam SAK-ETAP disebutkan dalam paragraf 3.12 dijelaskan informasi data keuangan untuk entitas yakni neraca, laba/rugi, berubahnya ekuitas, arus kas termasuk catatan dalam pelaporan keuangan. Dalam SAK ETAP terdapat syarat yang tercantum pada paragraf 3.9 yakni informasi data keuangan suatu koperasi pengungkapannya secara komparatif dari tahun sebelumnya. Pada paragraf 2.24 dijelaskan untuk pengakuan dalam unsur laporan keuangan sebagai tahap dibentuknya pos pada neraca atau bagian laba rugi dengan kriteria terdapat kemungkinan adanya manfaat faktor ekonomi dari pos teralir dari entitas dan terdapat nilai atau biaya dengan pengukuran secara andal. Paragraf 2.28-2.29 dijelaskan pos diwaktu tertentu terdapat tidak terdapat kriteria memenuhi syarat pengakuan dikarenakan suatu keadaan maka perlu dilaporkan dalam catatan.

Paragraf 2.33 dijelaskan entitas dalam penggunaan yakni akrual, kecuali laporan arus kas, dimana pos diakui berupa aktiva, hutang, modal, penghasilan dan beban sesuai SAK ETAP (IAI, 2018, p. 2.34-2.38).

#### *Pengukuran*

Paragraf 2.30 SAK ETAP dikemukakan pengukuran merupakan tahap ditetapkannya dana yang dipakai entitas dalam aktiva, hutang, penghasilan dan beban berdasarkan historis dan nilai wajar (IAI, 2018, p. 2.31a-2.31b). Pertama, Biaya Historis. Sebagai aktiva di kas atau setara kas dengan pembayaran dilakukan untuk mendapatkan aktiva. Hutang dicatat sesuai kas atau setara kas berdasarkan penerimaan saat dilakukan hutang. Kedua, Nilai Wajar. Sebagai jumlah dalam ditukarkannya aktiva untuk penyelesaian hutang bagi pihak yang melakukan transaksi.

#### *Penyajian*

SAK ETAP paragraf 3.2-3.4 dijelaskan penyajiannya meliputi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. Dimana perusahaan atau entitas tersebut dengan wajar melakukan pernyataan eksplisit dan penuh mengenai kepatuhan dari catatannya. Sangat penting untuk memberikan penjelasan tentang kemungkinan penggunaan kebijakan akuntansi yang tidak diatur dalam SAK ETAP. Dengan menyusun laporan keuangan ini, manajemen dapat menilai kemampuan suatu usaha untuk bertahan. Manajemen yang sadar akan tidak pasti bahwa suatu usaha akan bertahan dalam suatu kondisi tertentu, sehingga ketidakpastian ini harus dikomunikasikan.

Lebih lanjut dalam paragraf 3.6-3.7 SAK ETAP menyebutkan bahwa penyajian pos tiap tahun diwajibkan konsisten, kecuali adanya perubahan dan entitas perlu melakukan mereklasifikasi secara komparatif. Pengungkapan tersebut oleh entitas jika adanya reklasifikasi meliputi sifat, jumlah pos dan alasannya. Penyajiannya pada paragraf 3.10-3.11, dimana pos material ini disajikan secara terpisah sedangkan nonmaterial digabungkan berdasarkan sifat ataupun fungsi yang serupa. Adanya kelalaian pencantuman atau salahnya pencatatan pos dikatakan material, jika individu atau kelompok mampu mempengaruhi pengguna menentukan kebijakan ekonomi. SAK-ETAP terdapat arahan dalam menyajikan laporan keuangan yakni Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### *Pengungkapan*

Paragraf 8.5 dijelaskan landasan pengukuran dalam hal ini digunakan harus relevan agar mudah paham mengenai informasi yang disampaikan berdasarkan urutan penyajiannya dalam unsur laporan keuangan. Untuk pengungkapan lain meliputi komitmen, kontijensi, dan yang sifatnya non keuangan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan melakukan pengungkapan informasi keuangan untuk tiap asset diperoleh dan hutang dibayar pada sebelum dan sesudah 12 bulan tanggal dineraca.

#### **Definisi Konseptional**

Untuk penelitian ini, para ahli menggunakan konsep-konsep berikut sebagai dasar. Pengertian dari koperasi yang disampaikan oleh Subandi (2015, p. 19), "sebagai organisasi yang pendiriannya dilakukan oleh sekelompok orang dengan ekonomi yang terbatas dalam rangka tiap anggota tercapai sejahtera dilihat dari ekonomi". Penyusunan koperasi berdasarkan akuntansi keuangan berpatokan pada standar akuntansi keuangan.

Akuntansi keuangan menurut Subandi (2015, p. 3) adalah "Akuntansi dengan tujuan utama menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar. Pihak luar adalah pihak-pihak di luar manajemen perusahaan, seperti investor, kreditur, badan pemerintah dan pihak luar lainnya".

Sekarwati & Mazidah (2018) menjelaskan bahwa: Standar akuntansi koperasi sebagai patokan berperan penting mengenai pembuatan informasi keuangan pada koperasi. Hal ini bertujuan agar semua bagian berkaitan pada koperasi terkait mampu paham tentang informasi keuangan. Adapun standar akuntansi koperasi yang dibuat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berupa Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Baridwan (2018, p. 7) laporan keuangan diartikan sebagai "hasil pencatatan pada kegiatan atau transaksi perusahaan di tahun tertentu".

Menurut IAI (2018, p. 1.1) standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan: acuan selama proses pembuatan dan penyampaian data keuangan yang seragam. SAK dibuat pada tahun 1994 ketika KPAI digantikan oleh PAI periode 1984. Dalam hal ini, ETAP tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangannya untuk mencapai tujuan umum pemilik. Mereka tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis,

lembaga kredit, atau kreditor. Penyajian laporan keuangan menurut menurut SAK ETAP terdiri dari atas komponen-komponen sebagai berikut:

1. Pengakuan: Aset, Kewajiban, Penghasilan, Beban, Laba atau rugi
2. Pengukuran: Biaya Historis dan Nilai Wajar
3. Penyajian: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan
4. Pengungkapan

### Penelitian Terdahulu

Tabel 1 meringkas penelitian terdahulu tentang analisis laporan keuangan organisasi koperasi. Persamaan penelitian terletak pada unit analisis yang digunakan, yaitu SAK ETAP. Perbedaannya pada subyek yang diteliti, yaitu Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur.

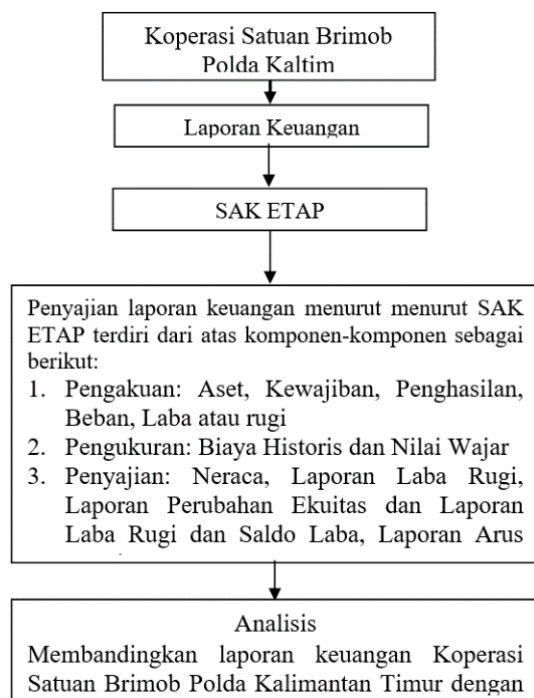
**Tabel 1. Penelitian Terdahulu tentang SAK-ETAP**

No	Judul / Nama (Tahun)	Tujuan Penelitian dan Analisis	Hasil
1	Analisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan koperasi karyawan industri kemas semen gresik (IKSG). Sekarwati, A. M. S., & Mazidah, N. (Sekarwati & Mazidah, 2018)	Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan koperasi karyawan industri kemas semen gresik (IKSG). Analisis: SAK ETAP	Tidak sesuai SAK ETAP yakni terdapat elemen pada laporan keuangan tidak ada penyajian. Selain itu sebagian pos tidak diperlakukan berdasarkan SAK ETAP.
2	Analisis Perbandingan Pelaporan Keuangan Koperasi dengan Penerapan SAK ETAP. Soesanto, S., & Rita, R. (Soesanto & Rita, 2019).	Untuk membandingkan pelaporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam PGRI Ranting I Pondok Ranji dengan SAK ETAP. Analisis: SAK ETAP	Secara umum telah mendekati klasifikasi pada SAK ETAP, namun perlu pengetahuan lebih mendalam tentang SAK-ETAP
3	Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP pada Koperasi Tunas Wira Mandiri. Mursidah, S., & Nasution, J. (Mursidah & Nasution, 2022).	Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Koperasi Tunas Wira Mandiri dengan SAK ETAP. Analisis: SAK ETAP	Masih terdapat ketidak-sesuaian dengan SAK ETAP karena kurang pengetahuan tentang SAK ETAP

Sumber: Riset sebelumnya

### Kerangka Pikir

Suatu kerangka pikir penelitian dapat dibuat berdasarkan teori yang ada, yaitu hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Gambar 1 menunjukkan kerangka pikir penelitian ini.



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

**METODE PENELITIAN**

**Fokus Studi**

Penulis melakukan penelitian ini pada Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dan berfokus pada penerapan SAK-ETAP. SAK-ETAP meliputi pengakuan: Aktiva, Hutang, Pendapatan, Beban, Laba/Rugi; pengukuran: Beban Historis dan Nilai Wajar; penyajian: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Arus Kas; dan Catatan Laporan Keuangan. Pengungkapan dilakukan pada tahun 2019.

**Kebutuhan Data**

Data berikut diperlukan untuk melengkapi tujuan penulisan ini: 1. Gambaran umum Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2019; 2. Struktur organisasi Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2019.

Laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2019 terdiri dari : a. Perhitungan Hasil Usaha Komparatif Per 31 Desember 2019 b. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Komparatif Per 31 Desember 2019 c. Laporan Perubahan Modal d. Laporan Arus Kas e. Catatan Atas Laporan Keuangan Sesuai SAK ETAP.

**Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode berikut digunakan untuk mengumpulkan data: Pertama, Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data dengan mengunjungi objek penelitian secara langsung. Metode ini termasuk observasi, yang melibatkan melihat dan memeriksa secara langsung objek penelitian, yaitu Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur; dan wawancara, yang melibatkan mengajukan pertanyaan kepada bagian yang terkait dan relevan. Kedua, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*): Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Ini dilakukan dengan melakukan penelitian literatur untuk mendapatkan data teoritis untuk menyelesaikan masalah yang diteliti. Teknik dokumentasi mengumpulkan data dengan melihat dan mempelajari dokumen dan catatan instansi yang diteliti atau menyalin catatan dari dokumen yang berhubungan dengan data yang telah dikumpulkan untuk dipelajari. Dokumen yang diteliti termasuk gambaran umum, struktur organisasi, dan laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur.

**Alat Analisis**

Alat analisis merupakan komponen penting dari suatu penelitian, dan penentuan alat analisis yang tepat sangat penting untuk mengukur dan memecahkan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, penulis menggunakan alat analisis yang sesuai dengan masalah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang berarti data observasi dikumpulkan, diolah, dan kemudian dipresentasikan sehingga orang lain dapat dengan mudah memahami sifat (karakteristik) objek. Tabel 2 menunjukkan kriteria keputusan berdasarkan analisis perbandingan. Digolongkan sesuai dengan SAK ETAP jika persentase > 50%. Alat analisis penelitian ini membandingkan laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dengan SAK ETAP (Tabel 3).

Selanjutnya dilakukan perhitungan menurut [Black & Champion \(2009\)](#) dengan cara sebagai berikut:

$$Persentasi\ kesesuaian = \frac{\sum\ Jumlah\ Jawaban\ YA}{\sum\ Total\ Jawaban\ Kuesioner} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Seperti yang dinyatakan oleh [Black & Champion \(2009\)](#), hasil dari perhitungan di atas membantu dalam pengambilan kesimpulan.

**Tabel 2. Kriteria Keputusan**

Persentase	Kriteria
0% - 25%	Dikategorikan belum sesuai
26% - 50%	Dikategorikan kurang sesuai
51% - 75%	Dikategorikan sesuai
76% - 100%	Dikategorikan sangat sesuai

Sumber: Metode & Masalah Penelitian Sosial oleh James A. Black, Dean J. Champion. Alih Bahasa: E. Koswara, Dira Salam, Alfin Ruzhendi ([Black & Champion, 2009](#))

**Tabel 3. Persamaan dan perbedaan antara penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur.**

No	Elemen-Elemen	SAK ETAP	Laporan Keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kaltim	
			Sesuai	Tidak Sesuai
1	Komponen Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neraca                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kas dan setara kas</li> <li>b. Piutang usaha dan piutang lainnya</li> <li>c. Persediaan</li> <li>d. Properti, investasi</li> <li>e. Aset tetap</li> <li>f. Aset tidak berwujud</li> <li>g. Utang usaha dan utang lainnya</li> <li>h. Aset dan kewajiban pajak</li> <li>i. Kewajiban di estimasi</li> <li>j. Ekuitas</li> </ol> </li> <li>2. Laba Rugi                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan</li> <li>b. Beban keuangan</li> <li>c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas</li> <li>d. Beban pajak</li> <li>b. Laba atau rugi netto</li> </ol> </li> <li>3. Perubahan Ekuitas                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Saldo Awal                                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Simpanan pokok</li> <li>2) Simpanan wajib</li> <li>3) Donasi</li> <li>4) Cadangan</li> <li>5) Modal penyerta</li> </ol> </li> <li>b. SHU</li> <li>c. Saldo Akhir</li> </ol> </li> <li>4. Laporan Arus Kas                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laba Bersih                                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Arus kas kegiatan operasi</li> <li>2) Arus kas kegiatan investasi</li> <li>3) Arus kas kegiatan pendanaan</li> </ol> </li> <li>b. Penurunan Kas</li> <li>c. Kas Awal Periode</li> <li>d. Kas Akhir Periode</li> </ol> </li> <li>5. Catatan Atas Laporan Keuangan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gambaran Umum</li> <li>b. Kebiasaan Akuntansi</li> </ol> </li> </ol>		
2	Pengakuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktiva</li> <li>2. Hutang/Kewajiban</li> <li>3. Penghasilan/Pendapatan</li> <li>4. Beban</li> <li>5. Laba atau Rugi</li> </ol>		
3	Pengukuran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Historis</li> <li>2. Nilai Wajar</li> </ol>		

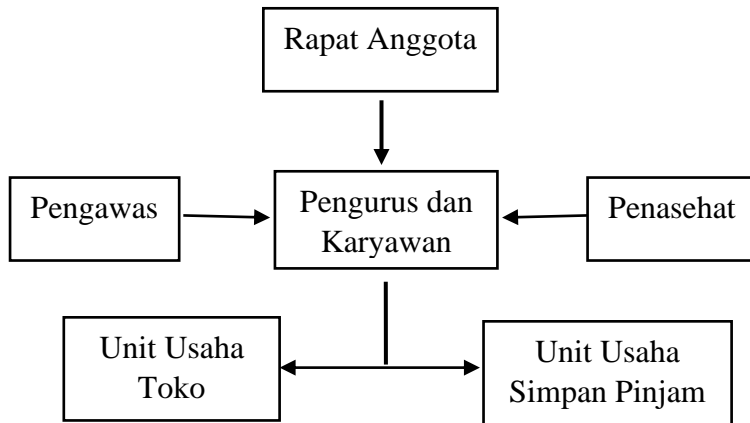
Sumber: SAK ETAP

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur ditampilkan pada Gambar 2. Penjelasan untuk Gambar 2 adalah sebagai berikut:





**Gambar 2. Struktur Organisasi Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur**

Sumber: Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur

1. Pengurus dan Karyawan

Pengurus Primkoppel Satbrimob Polda Kaltim periode 2019 – 2021 terdiri dari:

- a. Ketua Umum : Iptu Ristiano
- b. Sekretaris : Aiptu Rifa’l Yusni
- c. Bendahara : Bripka Marsuto

Karyawan Primkoppel Satbrimob Polda Kaltim dalam tahun buku 2018 terdiri dari:

- a. Karyawan Unit Usaha Toko sebanyak 5 (Lima) orang terdiri dari:
  - 1) Aiptu Rifa’i Yusni (Karyawan merangkap sekretaris)
  - 2) Aipda Mausul Arief
  - 3) Brigadir Eko Tulistyanto
  - 4) Brigadir Lugiyanto
  - 5) Emil
  - 6) Maya
  - 7) Fatma
- b. Karyawan Unit Usaha Simpan Pinjam Bernama Brigadir Trio Septiawan

Badan Pengawas/Pengawas

Pengawas Primkoppel Satbrimob Polda Kaltim periode 2019 -2021 terdiri dari :

- Ketua : AKP Edi Musdwiyono
- Anggota : 1. Iptu Ali Mustaji
- 2. Iptu Muhamad Chusen, SH

2. Dewan Penasehat

Dewan penasehat atau Pembina Primkoppel Satbrimob Polda Kaltim adalah Kasat dan WadanSat Brimob Polda Kaltim.

**Gambaran Umum Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur**

Gambaran umum Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dijelaskan berdasarkan bidang organisasi, bidang usaha, bidang keuangan, dan bidang inventaris.

*Bidang Organisasi*

1. Keanggotaan

Keanggotaan Primkoppel Satbrimob Polda Kaltim pada dasarnya diberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota. Dengan kata lain anggota yang masuk sebagai anggota Koperasi adalah sukarela (demokratis) tanpa ada tekanan dan paksaan. Untuk itu keanggotaan Primkoppel Satbrimob Polda Kaltim adalah Polri, PNS, PHL, yang ada dilingkungan Satuan Brimob Kepolisian Daerah Kaltim baik yang masih aktif maupun yang sudah MPP. Anggota Koperasi pada tahun buku 2018 sejumlah 540 orang dan tahun buku 2019 berjumlah 518 orang berarti turun sebanyak 22 orang.

2. Buku-buku Perlengkapan Organisasi

Buku-buku Perlengkapan Organisasi koperasi terdiri dari:

- a. Buku pokok terdiri dari 8 (delapan) macam sebagai berikut:
    - 1) Buku Daftar Anggota
    - 2) Buku Daftar Pengurus
    - 3) Buku Daftar Badan Pengawas
    - 4) Buku Daftar Karyawan
    - 5) Buku Simpanan Anggota
    - 6) Buku Notulen Rapat Anggota
    - 7) Buku Notulen Rapat Pengurus
    - 8) Buku Notulen Rapat Pengawas
  - b. Buku Penunjang terdiri dari 8 (delapan) macam sebagai berikut :
    - 1) Buku Tamu
    - 2) Buku Saran Anggota
    - 3) Buku Anjuran Pejabat Koperasi
    - 4) Buku Anjuran Pejabat Instansi Lain
    - 5) Buku Catatan Kejadian Penting
    - 6) Buku Saran Badan Pengawas
    - 7) Buku Daftar Inventaris
    - 8) Buku Agenda dan Ekspedisi
3. Surat Menyurat  
Surat menyurat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan administrasi perkoperasian baik reproduksi maupun pendistribusiannya serta berdasar Jukminu Polri.
4. Sistem Pembukuan  
Sistem pembukuan yang digunakan dalam Primkoppol Satbrimob Polda Kaltim adalah semi akuntansi.
5. Anggota Puskoppol Polda Kaltim  
Primkoppol Satbrimob Polda Kaltim sudah menjadi anggota Puskoppol Polda Kaltim dan telah membayar kewajiban berupa Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

#### *Bidang Usaha*

Usaha yang dikelola Primkoppol Satbrimob Polda Kaltim tahun buku 2018 yakni:

1. Unit Simpan Pinjam (Usipa)
  - a. Usaha simpan pinjam (Usipa) adalah unit usaha primadona, yaitu usaha yang banyak dimanfaatkan oleh para anggota atau sangat berhubungan dengan kepentingan para anggota, tahun buku 2018 dengan kontribusi sebesar 1% perbulan, dan tahun buku 2019 kontribusinya sama yaitu 1% perbulan dengan pembayaran angsuran pokok pinjaman dan jasa melalui potongan gaji oleh juru bayar.
  - b. Simpanan wajib merupakan simpanan yang dibayar oleh setiap anggota perbulan melalui pemotongan gaji oleh juru bayar, tahun 2018 sebesar Rp200.000 perbulan sedangkan tahun 2019 mulai Januari s/d April sebesar Rp200.000 dan mulai Mei 2019 dinaikan dari Rp200.000 menjadi Rp250.000, per bulan sesuai dengan keputusan RAT Tahun buku 2018 tanggal 4 April 2019 serta simpan pinjam ini tidak bias diambil kembali, kecuali anggota berhenti atau pindah tugas atau pension.
2. Unit Usaha Toko  
Unit Usaha Toko adalah merupakan unit usaha primadona kedua setelah unit usaha simpan pinjam karena hampir seluruh anggota menggunakan jasa toko dengan aneka kebutuhan sembako dan kebutuhan non sembako.  
Unit Usaha Toko Primkoppol ini juga dapat melayani kredit barang kepada para anggota seperti kulkas, TV, Air Condition (AC), Kipas angin, Laptop, Sepeda Motor dan kebutuhan lain yang diperlukan para anggota sesuai dengan kesepakatan dengan Pengelola Unit Usaha Toko, dengan pembayaran melalui pemotongan gaji melalui juru bayar.
3. Unit Usaha Kantin  
Unit Usaha Kantin adalah merupakan unit usaha Primkoppol dengan cara : Primkoppol membangun tempat usaha, lalu disewakan kepada anggota Primkoppol atau non Anggota dengan pembayaran kepada Primkoppol sesuai kesepakatan dan hasil sewanya juga diperhitungkan atau dibagikan kepada para anggota sesuai dengan ketentuan perkoperasiaan.
4. Unit Usaha Penyewaan Tempat untuk ATM  
Unit Usaha Penyewaan Tempat untuk ATM adalah merupakan unit usaha Primkoppol bekerja sama dengan bank-bank yang membutuhkan tempat ATM, kemudian bank mengontrak tempat

ATM sesuai dengan permufakatan dengan pengurus dan bank membayar kontrak per dua tahun tiap tahun membayar tunai kepada Primkoppol sebesar Rp15.000.000. Dan dana tunai ini diperhitungkan dalam Perhitungan Hasil Usaha Primkoppol dan dibagikan kepada anggota.

#### *Bidang Keuangan*

Dalam bidang keuangan ini berupa:

1. Laporan Keuangan (Financial Statement) terdiri:
  - a. Perhitungan Hasil Usaha Komparatif
  - b. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Komparatif
  - c. Penjelasan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Komparatif
2. Analisis Rasio Keuangan Komparatif
3. Daftar Piutang Barang Toko
4. Daftar Piutang Usipa
5. Daftar Persediaan Barang Dagangan
6. Daftar inventaris
7. Pembagian Sisa Hasil Usaha Komperatif
8. Daftar Simpanan, Jasa Usaha dan Bagian SHU anggota
9. Rencana Perhitungan Hasil Usaha.

#### **Bidang Inventaris**

Inventaris Primkoppol Satbrimob Polda Kaltim adalah merupakan fixed asset kepemilikan koperasi dengan penyajiannya berbentuk Daftar Inventaris untuk tahun buku 2019 (terlampir). Dari hasil dikemukakan diatas, atas aktivitas pengurus Primkoppol Satbrimob Polda Kaltim mengenai hasil yang telah dicapai terkait aktivitas yang dilakukan para anggota periode 2019 dan Program Kerja serta Rencana Perhitungan Hasil Usaha Tahun 2020 yakni:

1. Kegiatan usaha belum berkembang secara optimal.
2. Pemanfaatan para anggota terhadap Usipa sudah maksimal, hanya saja masih kekurangan modal demikian pula usaha took.
3. SHU Primkoppol Satbrimob Polda Kaltim tahun buku 2018 adalah Rp768.599.320. dan tahun 2019 sebanyak Rp788.817.573. naik sebanyak Rp20.218.253 dengan jasa Usipa 1% per bulan.
4. Aset tahun 2018 sebesar Rp6.594.964.587 dan tahun 2019 sebesar Rp9.256.610.015 meningkat sebesar Rp2.661.645.587.
5. Modal Sendiri atau Kekayaan Bersih Tahun buku 2018 sebesar Rp5.539.235.030 dan tahun buku 2019 sebesar Rp6.828.457.962 naik sebesar Rp1.289.222.932.
6. Telah dibuat program kerja maupun rencana perhitungan hasil usaha tahun 2020.
7. Modal koperasi berdasarkan iuran anggota berupa simpanan pokok dan wajib dari tahun ke tahun terus bertambah maupun dana cadangan, serta dana-dana lain terus bertambah dan donasi.

**Tabel 4. Ringkasan Hasil Usaha Komparatif Periode yang Berakhir 31 Desember 2018 & 2019**

No	Keterangan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
A	Hasil Usaha Toko		
1	Penjualan	2.874.299.800	2.688.792.050
	Harga Pokok Penjualan	2.685.435.672	2.500.524.903
	SHU Bruto (A)	188.864.128	188.267.147
B	Hasil Usipa dan Jasa		
	Total Hasil Usipa dan Jasa (B)	820.491.170	866.707.000
	Total SHU (A & B)	1.009.355.298	1.054.974.147
C	Beban Administrasi dan Umum		
	Total Beban Administrasi dan Umum (C)	133.075.000	166.443.200
D	Beban Usaha Toko		
	Total Beban Usaha Toko (D)	103.144.325	95.147.834
E	Beban Usaha Simpan Pinjam		
	Total Beban Usipa (E)	4.492.500	4.516.700
	Total Beban Usaha (C+D+E)	240.711.825	266.107.734
	Sisa Hasil usaha (A+B-C+D+E)	768.643.473	788.866.413
F	Pendapatan dan Beban Non Usaha		
	Laba Non-Usaha (F)	(44.153)	(48.840)
	Sisa Hasil Usaha Netto	768.599.320	788.817.573

Sumber: Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur, 2018 dan 2019

### Perhitungan Hasil Usaha Komparatif

Tabel 4 merupakan ringkasan dari laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur menunjukkan data perhitungan hasil usaha komparatif. Ini mencakup hasil usaha toko, hasil usipa dan jasa, beban administrasi dan umum, beban usaha toko, beban simpan pinjam, dan pendapatan dan beban non usaha.

### Neraca Komparatif

Berdasarkan ringkasan neraca komparatif pada laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur terdapat aset yang terdiri atas aset lancar, penyertaan dan aset tetap serta pasiva meliputi liabilitas lancar dan kekayaan bersih. Kemudian terdapat SHU yang dapat dilihat tabel 5.

**Tabel 5. Ringkasan Neraca Komparatif Per 31 Desember 2018 & 2019**

No	Keterangan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
I	Aset		
A	Aset Lancar	6.561.109.014	9.185.256.576
B	Penyertaan	2.386.963	2.386.963
C	Aset Tetap	31.468.610	68.966.476
II	Pasiva		
D	Liabilitas Lancar	287.130.237	1.639.334.480
E	Kekayaan Bersih	5.539.235.030	6.828.457.962
	Sisa Hasil Usaha	768.599.320	788.817.573

Sumber: Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur, 2018 dan 2019

### Analisis Data

Dari perincian laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2018 dan 2019, maka disajikan yang telah diperbaiki dan sesuai SAK ETAP disajikan pada Tabel 6 (Ringkasan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur Periode yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2019), Tabel 7 (Ringkasan Laporan Perubahan Modal Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur Periode yang Berakhir 31 Desember 2018), Tabel 8 (Ringkasan Laporan Perubahan Modal Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur Periode yang Berakhir 31 Desember 2019), Tabel 9 (Ringkasan Neraca Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur Per 31 Desember 2018 dan 2019), Tabel 10 (Ringkasan Laporan Arus Kas Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur Periode yang Berakhir 31 Desember 2018), dan Tabel 11 (Ringkasan Laporan Arus Kas Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur Periode yang Berakhir 31 Desember 2019).

**Tabel 6. Ringkasan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur Periode yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2019**

No	Keterangan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
A	Hasil Usaha Toko		
	Penjualan	2.874.299.800	2.688.792.050
	Harga Pokok Penjualan	2.685.435.672	2.500.524.903
	SHU Bruto (A)	188.864.128	188.267.147
B	Hasil Usipa dan Jasa		
	Total Hasil Usipa dan Jasa (B)	820.491.170	866.707.000
	Total SHU (A & B)	1.009.355.298	1.054.974.147
C	Beban Administrasi dan Umum		
	Total Beban Administrasi dan Umum (C)	133.075.000	166.443.200
D	Beban Usaha Toko		
	Total Beban Usaha Toko (D)	103.144.325	95.147.834
E	Beban Usaha Simpan Pinjam		
	Total Beban Usipa (E)	4.492.500	4.516.700
	Total Beban Usaha (C+D+E)	240.711.825	266.107.734
	Sisa Hasil usaha (A+B-C+D+E)	768.643.473	788.866.413
F	Pendapatan dan Beban Non-Usaha		
	Laba Non-Usaha (F)	(44.153)	(48.840)
	SHU Sebelum Pajak	768.599.320	788.817.573
	Pajak 15%	(115.289.898)	(118.322.636)
	SHU Setelah Pajak	653.309.422	670.494.937

Sumber: Data diolah, 2022

**Tabel 7. Ringkasan Laporan Perubahan Modal Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur Periode yang Berakhir 31 Desember 2018**

Saldo Awal			117.278.261
Jumlah Penambahan			5.536.848.067
SHU tahun berjalan			768.599.320
Saldo Akhir			6.422.725.648

Sumber: Data diolah, 2022

**Tabel 8. Ringkasan Laporan Perubahan Modal Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur Periode yang Berakhir 31 Desember 2019**

Saldo Awal			99.398.068
Jumlah Penambahan			6.826.070.999
SHU tahun berjalan			788.817.573
Saldo Akhir			7.714.286.640

Sumber: Data diolah, 2022

**Tabel 9. Ringkasan Neraca Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur Per 31 Desember 2018 dan 2019**

No	Keterangan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
I	Aset		
A	Aset Lancar	6.561.109.014	9.185.256.576
B	Penyertaan	2.386.963	2.386.963
C	Aset Tetap	31.468.610	68.966.476
	Total Aset	6.594.964.587	9.256.610.015
II	Pasiva		
D	Liabilitas Lancar	287.130.237	1.639.334.480
E	Kekayaan Bersih	5.539.235.030	6.828.457.962
	Sisa Hasil Usaha	768.599.320	788.817.573
	Total Pasiva	6.594.964.587	9.256.610.015

Sumber: Data diolah, 2022

**Tabel 10. Ringkasan Laporan Arus Kas Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur Periode yang Berakhir 31 Desember 2018**

Laba Bersih			653.309.422
	Arus Kas Kegiatan Operasi:		73.798.897
	Arus Kas Kegiatan Inventasi:		50.278.220
	Arus Kas Kegiatan Pendanaan		213.331.340
Penurunan Kas			(318.598.847)
Kas Awal Periode			356.104.495
Kas Akhir Periode			334.710.575

Sumber: Data diolah, 2022

**Tabel 11. Ringkasan Laporan Arus Kas Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur Periode yang Berakhir 31 Desember 2019**

Laba Bersih			670.494.937
	Arus Kas Kegiatan Operasi:		1.389.073.174
	Arus Kas Kegiatan Inventasi:		150.602.952
	Arus Kas Kegiatan Pendanaan		250.261.306
Penurunan Kas			(1.708.300.956)
Kas Awal Periode			566.500.734
Kas Akhir Periode			(1.141.800.222)

Sumber: Data diolah, 2022

**Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Sesuai SAK ETAP**

Catatan atas laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Umum
  - a. Pendirian

Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur didirikan di Balikpapan pada tahun 1991, Koperasi yang bergerak di beberapa unit usaha terutama simpan pinjam ini beralamat di Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

- b. Perijinan  
Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur secara Sah Berbadan Hukum dengan Nomor Keputusan Kapolri No Pol : Kep/05/IV/1991 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan prosedur Primer Koperasi Kepolisian RI.
  - c. Keanggotaan  
Pada dasarnya, anggota Primkoppol Satbrimob Polda Kaltim dapat masuk dan keluar dengan bebas. Dalam hal ini, anggota, termasuk anggota koperasi, bertindak secara sukarela (demokrasi) tanpa tekanan atau dorongan. Dengan demikian, Primkoppol Satbrimob Polda Kaltim terdiri dari anggota Polri, PNS, dan PHL yang beroperasi di lingkungan Satuan Brimob Kepolisian Daerah Kaltim, baik yang masih terdaftar aktif maupun yang telah menerima pangkat MPP. Anggotanya turun sebanyak 22 orang dari 540 orang pada tahun 2018 dan 518 orang pada tahun buku 2019.
2. Kebijakan Akuntansi
- a. Dasar Penyusunan  
Penyusunan berlandaskan SAK ETAP dengan sistem akrual basis terkecuali arus kasnya. Untuk pelaporan arus kas disusun menggunakan metode yang tidak langsung yang berfokus pada laba/rugi bersih dengan mengelompokkan pendapatan dan pengeluaran kas yang dikeluarkan dalam kegiatan operasi, pendanaan maupun investasi dengan mata uang berupa rupiah.
  - b. Kas dan Setara Kas  
Meliputi kas ditangan pada periode 2018 ini sebesar Rp356.104.495 dan periode 2019 sebesar Rp566.500.734. Kas di tangan digunakan untuk memenuhi biaya operasional sehari-hari, seperti pembelian alat tulis kantor, pembelian bahan baku produksi kopi, jasa fotokopi, kantin, simpan pinjam dan biaya operasional lainnya.
  - c. Piutang Usaha  
Piutang koperasi ini sendiri dibedakan menjadi 2 yang pertama yaitu piutang dagang dan piutang usipa. Untuk piutang dagang tahun 2018 sebesar Rp324.474.650 dan 2019 sebesar Rp316.537.350. Sedangkan piutang simpan pinjam tahun 2018 sebesar Rp5.778.276.500 dan 2019 sebesar Rp8.143.829.950.
  - d. Aset Tetap  
Nilai aset tetap diakui sebesar nilai perolehan pada periode 2018 sebesar Rp6.594.964.587 dan 2019 sebesar Rp9.256.610.015. Penyusutan dihitung berdasarkan masa manfaat yang digunakan teknik penyusutan garis lurus.
  - e. Pendapatan dan Beban  
Diterima koperasi berasal dari pendapatan jasa unit Simpan Pinjam, Sewa Konter HP/Sewa Ruang ATM dan Sewa Kantin yang pada periode 2018 berjumlah Rp820.491.170 dan 2019 berjumlah Rp866.707.000. Sedangkan beban diperoleh dari Beban Penyusutan, beban RAT, beban Operasional serta beban Administrasi dan Umum yang pada periode 2018 berjumlah Rp240.711.825 dan 2019 berjumlah Rp266.107.734.
  - f. Hutang  
Hutang Koperasi berupa hutang kepada Bank untuk pengembangan usaha yang tercatat pada periode 2018 sebesar Rp.287.130.237 dan pada periode 2019 sebesar Rp1.639.334.480.
  - g. Perpajakan  
Dikenakan pajak pada Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur adalah PPh Pasal 23 sebesar 15% dari SHU koperasi karena berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, SHU dalam deviden sebagai objek PPh sehingga harus dilaporkan dalam SPT Tahunan penerima. Jadi pajak koperasi periode 2018 sebesar Rp115.289.898 dan 2019 sebesar Rp118.322.636.
  - h. SHU  
SHU tahun 2018 koperasi yang semula sebesar Rp768.599.320 menjadi Rp653.309.422 serta tahun 2019 semula sebesar Rp788.817.573 menjadi Rp670.494.937 akibat pengurangan pajak. Dan SHU ini dibagikan untuk Cadangan sebesar 30%, Jasa Usaha sebesar 20%, Jasa Simpananan sebesar 25%, Dana Pengurus 10%, dan Dana Karyawan, Pendidikan, Sosial masing-masing 5%.



Berdasarkan Tabel 12 dan perhitungan persentase kesesuaian, nilai perbandingan sebesar 75% berada di antara 51 dan 75% yang sesuai. Laporan keuangan tahun 2019 Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur telah memenuhi persyaratan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP). Namun, meskipun SAK ETAP memiliki 5 komponen: Neraca, Laba Rugi, Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, elemen pelaporan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur hanya terdiri dari 2 komponen: Neraca dan Laba Rugi. Akibatnya, laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tidak memiliki 3 komponen: Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Akibatnya, laporan keuangannya dari Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tidak sesuai dengan SAK ETAP berdasarkan komponennya.

Dilihat dari elemen pengakuan, jelas bahwa pelaporan data keuangannya Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur menggunakan basis akrual, yang mencatat penghasilan dan beban untuk periode saat transaksi terjadi, bukan saat pendapatan diterima atau dibayarkan. Oleh karena itu, pelaporan data keuangannya sesuai dengan SAK ETAP karena menggunakan basis akrual.

Untuk elemen pengukuran, laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur menggunakan biaya historis. Untuk aktiva tetap, pengukuran harus mengacu pada beban yang diperolehnya, dan perhitungan akumulasi dilakukan pada tanggal perolehan. Oleh karena itu, laporan data keuangannya sesuai dengan SAK ETAP karena menggunakan biaya historis.

Diketahui bahwa elemen neraca Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur hanya terdiri dari 6 pos, yaitu kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, aset tetap, hutang usaha dan hutang lainnya, dan ekuitas. Sebaliknya, elemen SAK ETAP terdiri dari 10 komponen, yaitu kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti dan investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, hutang usaha dan hutang lainnya, aset dan kewajiban Pelaporan keuangan yang dibuat oleh Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tidak sesuai dengan SAK ETAP berdasarkan neraca.

Untuk elemen laba rugi, seperti yang diketahui, pelaporan data keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur hanya terdiri dari 2 pos, yaitu penghasilan dan biaya keuangan. Namun, SAK ETAP terdiri dari 5 komponen, yaitu penghasilan, biaya akibat transaksi keuangan, laba/rugi proses investasi dengan ekuitas, biaya pajak, dan laba/rugi netto. Oleh karena itu, pelaporan data keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur hanya terdiri dari 2 pos,

## **Pembahasan**

Melalui perolehan penelitian tentang penerapan SAK ETAP untuk laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur diketahui bahwa terdapat pelaporan data keuangannya yang belum memenuhi standar untuk SAK ETAP tahun 2016.

### **1. Komponen Laporan Keuangan**

Untuk SAK ETAP tahun 2009 memiliki aturan untuk diimplementasikan berupa panduan disusunnya laporan keuangan. Dimana dalam neraca terdapat dipisahkannya suatu aset terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar, begitupula hutang atau kewajiban meliputi jangka pendek dan panjang. Untuk pengakuan biaya terjadi berdasarkan dampak langsung adanya pengakuan aktiva dan pengakuan kewajiban dilaporkan laba/rugi. SAK ETAP menyarankan laporan keuangan perlu lengkap terdiri mulai dari neraca, laporan laba/rugi, perubahan ekuitas, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur hanya terdiri dari 2 komponen: Neraca dan Laba Rugi. Sementara SAK ETAP terdiri dari 5 komponen: Neraca, Laba Rugi, Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tidak memiliki 3 komponen tersebut.

Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur mencatat transaksi keuangan secara rutin setiap bulan dan dibukukan dalam laporan RAT setiap tahunnya. Karena koperasi ini memiliki banyak unit usaha, terdapat penanggungjawab yang melaporkan transaksi keuangan kepada bendahara koperasi untuk dibuat laporan keuangan koperasi secara keseluruhan atau keseluruhan, yaitu bendahara dari setiap unit usaha. Laporan keuangan disusun oleh dua orang Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur masih memiliki jumlah personel yang terbatas serta kemampuan untuk melaporkan keuangannya sesuai dengan SAK-ETAP. Akibatnya, pelaksanaannya masih terbatas.

SAK-ETAP memberikan penjelasan tentang laporan keuangannya, yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang menggabungkan informasi akuntansi. Selain itu, laporan keuangannya diberikan kepada Koperasi



Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur, yang disajikan dalam bentuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi, atau lebih dikenal sebagai Laporan Perubahan Hasil Usaha di koperasi.

Untuk transaksi di koperasi yang suatu kondisi belum ada pengaturan spesifik berlandaskan SAK-ETAP, memerlukan manajemen koperasi untuk penggunaan *judgement* agar dapat terjadi pengembangan dan penerapan kebijakan dalam akuntansi supaya dihasilkan informasi relevan untuk pengguna laporan tersebut. Perlu pembuatan pelaporan keuangan dengan penyajiannya jujur pada posisi keuangan, menyajikan kinerja keuangan termasuk arus kas. Selain itu, perlu netral berupa bebas dari bias, dapat tercermin kehati-hatian maupun lengkap untuk tiap elemen.

Hasil analisis dengan SAK ETAP ini sejalan dengan hasil penelitian oleh [Mursidah & Nasution \(2022\)](#), [Soesanto & Rita \(2019\)](#), dan [Sekarwati & Mazidah \(2018\)](#), yang mengungkapkan bahwa Komponen Laporan Keuangan SAK ETAP belum diterapkan sepenuhnya oleh Koperasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap komponen LK yang diwajibkan pada SAK ETAP ([Handayani & Suryaningrum, 2020](#); [Oktaritama & Januarti, 2020](#)). Oleh karena itu, masih penting untuk dilakukan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi. Selain itu, pada tahun 2025, SAK ETAP akan dicabut dan digantikan dengan SAK Entitas Privat per 1 Januari 2025 ([IAI, 2023](#)).

## 2. Pengakuan

Menurut elemen pengakuan, laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dibuat berdasarkan basis akrual, yang berarti bahwa pemasukan dan beban dicatat selama periode transaksi, bukan saat pendapatan diterima atau dibayarkan. Dengan demikian, laporan keuangannya sesuai dengan SAK-ETAP dan diakui berdasarkan basis akrual.

SAK-ETAP 2.33 dijelaskan tiap entitas wajib melakukan penyusunan pelaporan keuangan terkecuali pelaporan arus kas berlandaskan akrual. Tiap dasar akrual diketahui pengakuan pos merupakan aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan beban yang terwujudnya pengertian dan kriteria pengakuan tiap pos. Nomor 2.34 dijelaskan pengakuan aktiva pada neraca dimungkinkan terdapat kemanfaatan ekonomi pada waktu akan datang dapat adanya pengaliran menuju entitas dan aktiva tersebut perlu terdapat nilai maupun biaya dengan pengukuran yang handal. Aktiva tidak terjadi pengakuan dineraca apabila dilakukan pengeluaran namun kemanfaatan ekonomi tidak tertuju pada entitas untuk tahun terkait. Alternatifnya menyebabkan adanya pengakuan pada beban di laba/rugi.

SAK-ETAP 2.35 dijelaskan pengakuan hutang pada neraca dengan adanya dimungkinkan terjadi pengeluaran sumberdaya memiliki kemanfaatan ekonomi berupa penyelesaian hutang saat ini dengan nilai yang pengukurannya secara handal. Nomor 2.36 berupa pendapatan yang diakui sebagai dampak langsung dengan diakuinya aktiva dan hutang. Pengakuan pendapatan pada pelaporan laba/rugi dengan peningkatan kemanfaatan ekonomi diwaktu akan datang terkait terjadinya kenaikan aktiva maupun turunnya hutang dengan pengukuran dilakukan secara handal. Nomor 2.37 berupa beban diakui sebagai dampak langsung atas dasar diakuinya aktiva dan hutang. Pengakuan beban pada pelaporan laba/rugi yang terjadi turunnya kemanfaatan ekonomi diwaktu akan datang terkait turunnya aktiva dan naiknya hutang yang pengukurannya dilakukan secara handal.

SAK-ETAP 2.38 dijelaskan laba/rugi sebagai varians/selisih pada pendapatan dan biaya yang terpisah pada pelaporan keuangannya dengan prinsip pengakuan terpisah tidak diharuskan. Nomor 2.39 tidak adanya pengizinan untuk pos yang diakui di neraca dengan tidak sesuai pengertian aktiva dan hutang yang terjadinya pengabaian pos-pos menerapkan "*matching concept*".

## 3. Pengukuran

Untuk elemen pengukuran, seperti yang diketahui, laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur menggunakan biaya historis. Ini berarti bahwa untuk aset tidak lancar, nilai beban yang diperolehnya harus dihitung, dan perhitungan akumulasi dilakukan pada tanggal perolehan aset tersebut. Ini berarti bahwa laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur telah sesuai dengan SAK ETAP nomor 11.3. Selain itu, dalam 15.6 dijelaskan bahwa pada saat pengakuan awal, aset tetap harus dihitung sebesar biaya perolehan.

## 4. Neraca

Diketahui bahwa laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur hanya terdiri dari 6 pos pada elemen neraca, yaitu kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, aset tidak lancar, kewajiban usaha, kewajiban lainnya, dan ekuitas. Sebaliknya, SAK ETAP terdiri dari 10 komponen, yaitu kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti dan investasi, aset tidak lancar, aset tidak berwujud, kewajiban. Selain itu, neraca Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tidak sesuai dengan SAK ETAP.

Bab 4 SAK ETAP mengatur informasi dalam neraca dan cara penyajiannya. Aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas ditunjukkan dalam neraca pada tanggal akhir periode pelaporan. Meskipun neraca Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur disajikan dengan baik dan diformat sesuai dengan SAK ETAP, tidak ada pos hutang pajak. Ini bertentangan dengan SAK ETAP, yang mewajibkan entitas untuk menyertakan pos hutang pajak pada neracanya.

## 5. Laba/Rugi

Dalam laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur, elemen laba rugi hanya terdiri dari 2 pos, yaitu penghasilan dan biaya keuangan. Namun, SAK ETAP terdiri dari 5 komponen, yaitu pendapatan, beban keuangan, laba atau rugi dari investasi metode ekuitas, beban pajak, dan laba atau rugi netto. Oleh karena itu, dalam laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tidak terdapat 3 pos yang mencakup laba atau rugi dari investasi metode ekuitas.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, SHU termasuk dalam pengertian deviden yang merupakan objek PPh dan harus dilaporkan dalam SPT Tahunan penerima. Akibatnya, pajak yang dikenakan pada Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur adalah PPh Pasal 23 sebesar 15% dari SHU koperasi.

Bab 5 SAK ETAP 2016 menetapkan bahwa entitas harus menyajikan laporan laba rugi yang menggambarkan kinerja keuangannya selama periode tersebut. Bab ini juga mengatur informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan cara penyajiannya. Penghasilan dan biaya entitas ditunjukkan dalam laporan laba rugi selama suatu periode, yang digambarkan sebagai berikut:

Menurut SAK ETAP nomor 5.3, entitas harus mencakup minimal pos, judul, dan sub jumlah berikut dalam laporan laba rugi: pendapatan; beban keuangan; beban pajak; bagian laba atau rugi dari investasi dengan metode ekuitas; dan laba atau rugi neto. Menurut SAK ETAP nomor 5.4, entitas harus menyajikan pos, judul, dan sub jumlah lainnya dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Namun, SAK ETAP (1) Analisis menggunakan Sifat Beban: Metode ini mengumpulkan beban dalam laporan laba rugi berdasarkan sifatnya (seperti penyusutan, biaya bahan baku, biaya transportasi, kompensasi kerja, dan biaya iklan), dan tidak dibagi antara fungsi entitas. (2) Analisis Fungsi Beban: Metode ini menghitung beban sebagai bagian dari biaya penjualan atau, sebagai contoh, biaya aktivitas distro. SAK ETAP nomor 5.7 menyatakan bahwa entitas disarankan untuk memasukkan analisis di atas ke dalam laporan laba rugi; SAK ETAP nomor 5.8 menyatakan bahwa entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi harus mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, seperti beban imbalan kerja dan penyusutan.

Adapun koperasi didirikan umumnya dengan maksud peningkatan kesejahteraan tiap anggota. Peekoperasi Indonesia tidak dapat dibedakan dari penataan ekonomi negara ini bersifat demokratis dan adil, maka koperasi memiliki sifat terbuka membuat para pengurusnya perlu bertanggungjawab dengan memberikan pelaporan kegiatan koperasi tiap rapat yang dilakukan. Untuk itu pada keuangan koperasi menjadi bagian dari pelaporan koperasi dalam tiap rapatnya meliputi pelaksanaan usaha lainnya, perolehan akhir pekerasian. Pelaporan inilah yang perlu disesuaikan dengan standar agar mudah membandingkan kinerja keuangan dan proses pengambilan keputusan.

SAK ETAP menjadi standar dalam akuntansi yang dapat dipergunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik dalam penerbitan laporan keuangannya, yang mana umumnya tujuan dilakukannya pada pihak eksternal seperti *owner* tanpa keterlibatan secara langsung untuk dikelolanya usaha, termasuk kreditor dan organisasi yang melakukan peringkat kredit. Adapun entitas ini dapat disebut mempunyai akuntabilitas publik apabila mereka telah melakukan pendaftaran, atau tahap proses dilakukan pengajuan. Sedangkan otoritas dalam pasar modal dan regulator lainnya berupa diterbitkannya efek untuk pasar modal, yang mana entitas terkait terdapat dikuasai asset pada fidusia dalam kelompok besar di masyarakat meliputi bank, asuransi, pialang, dana pensiun, reksadana dan bank untuk investasi.

SAK ETAP itu sendiri penerbitannya dilakukan IAI yang penilaian disusunnya laporan keuangan berdasarkan PSAK berlandaskan IFRS tergolong susah diterapkan pada pengusaha UKM, padahal sebagian besar pengusaha di Indonesia masih tergolong skala kecil dan menengah. Sehingga diterbitkannya SAK ETAP berdasarkan IFRS *for* SME dengan ringkas melalui modifikasi menyesuaikan keadaan pengusaha kondisi di Indonesia. Penerbitan SAK ETAP bertujuan mudahnya pengusaha UKM dalam pembuatan pelaporan data keuangannya agar memiliki laporan yang dapat diandalkan. Meskipun SAK ETAP akan memudahkan bagi Koperasi, masih banyak koperasi yang belum menerapkan SAK ETAP secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini, sebanyak 75% koperasi telah memenuhi SAK ETAP. Hal yang sama terjadi pada KPRI Pengayoman 1 Lapas Dompu yang terbukti hanya membuat Laporan Posisi Keuangan,

Laporan Laba Rugi, dan CaLK dan belum membuat Laporan perubahan ekuitas dan arus kas (Mulyati, 2020). Faktor utama yang menyebabkan kurangnya penerapan SAK ETAP ini adalah bersumber dari sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki koperasi. Beberapa penelitian membuktikan bahwa Tingkat Pendidikan, pemahaman SAK, kemampuan teknologi dapat memengaruhi penerapan SAK, termasuk SAK ETAP (Handayani & Suryaningrum, 2020; Hulopi et al., 2021; Lohanda, 2017; Oktaritama & Januarti, 2020).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, serta analisis dan diskusi tentang yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2019 telah memenuhi persyaratan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP). Namun, karena hanya terdiri dari 2 laporan keuangan, data yang dibuat berdasarkan SAK ETAP pada tahun 2018 dan 2019 masih kurang. Akibatnya, laporan keuangannya dari Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tidak sesuai dengan SAK ETAP berdasarkan komponennya.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran awal yang dapat dikemukakan adalah bahwa Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur harus membuat laporan keuangan yang tersusun berlandaskan SAK ETAP. Ini termasuk memasukkan pajak 15% pada perhitungan SHU, membuat laporan perubahan modal, membuat arus kas, dan membuat catatan dari pelaporan data keuangan. Ini akan membuat laporan keuangan lengkap dan mudah dipahami pihak terkait. Diharapkan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur memiliki kemampuan untuk mencatat semua aktivitas operasinya secara menyeluruh, melakukan siklus akuntansi secara menyeluruh, dan mengklasifikasikan pos-pos secara akurat untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan SAK ETAP, diharapkan Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur memiliki tenaga kerja yang memahami dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Kedua, peneliti lain diharapkan untuk melakukan penelitian pada berbagai koperasi dengan melihat bagaimana Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) diterapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana SAK ETAP diterapkan pada Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dibandingkan dengan koperasi lain.

## Ucapan Terimakasih

Para penulis mengucapkan terimakasih kepada Koperasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian di Koperasi tersebut.

## Daftar Singkatan

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP), Rapat Anggota Tahunan (RAT), Sisa Hasil Usaha (SHU), Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Air Condition (AC), Unit Simpan Pinjam (Usipa), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## Kontribusi Penulis

YW membuat draf awal, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyusun draft artikel. YW, DS, dan RMH menyelesaikan artikelnya, dan DS dan RMH melakukan revisi akhir.

## Informasi Penulis

*Yuli Wahyuni (YW)* adalah alumni program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda pada tahun 2022. Sejak kuliah, penulis sangat berminat untuk dapat bekerja dalam bidang akuntansi dan keuangan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk berwiraswasta. Penulis pernah bekerja di Yayasan Melati Samarinda.

*Danna Solihin (DS)* adalah dosen dan ketua program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Penulis telah menyelesaikan Master di bidang akuntansi. Minat penelitian selain sesuai dengan bidang akuntansi, penulis juga tertarik di bidang ilmu ekonomi dan Manajemen. Tautan Google Scholar adalah <https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=0CfjU5wAAAAJ>

Rina Masithoh Haryadi (RMH) adalah dosen program studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Penulis telah menyelesaikan Master di bidang Manajemen dan saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Tautan Google Scholar adalah <https://scholar.google.co.id/citations?user=99o7x7IAAAAJ&hl=en>

### Konflik Kepentingan

Para peneliti menyatakan tidak terjadi konflik kepentingan.

### Pendanaan

Penelitian ini tidak didanai oleh pihak manapun.

### Ketersediaan Data

Data dapat diminta kepada penulis korespondensi melalui email dengan menyebutkan keperluan permintaan data.

## REFERENSI

- Ayuningtyas, P. C. (2023). Penerapan Pencatatan Keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perusahaan Jasa Advertising Berbasis SAK ETAP. *Small Business Accounting Management and Entrepreneurship Review*, 3(2), 39–49. <https://doi.org/10.61656/sbamer.v3i2.41>
- Baridwan. (2018). *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode (Edisi 5)*. Yogyakarta: BPPE.
- Black, J. A., & Champion, D. J. (2009). *Metode & Masalah Penelitian Sosial (E. Koswara, D. Salam, & A. Ruzhendy (eds.))*. Bandung: Refika Aditama.
- Ghofirin, M. (2020). *Permasalahan Koperasi di Masa Kini*. Opopjatim. <https://opop.jatimprov.go.id/detail/10/permasalahan-koperasi-di-masa-kini>
- Gulo, I. R. P., Bate'e, M. M., & Telaumbanua, Y. N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Pada Koperasi Konsumen Tokosa Sahabat Sejati Kota Gunungsitoli. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(4), 1436–1444. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/43970>
- Handayani, S., & Suryaningrum, D. H. (2020). Penerapan ETAP untuk Pencatatan Keuangan pada Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus UD Bina Mitra Penyamakan Kulit di Magetan). *Small Business Accounting Management and Entrepreneurship Review*, 1(1), 22–34. <https://dhsjournal.id/index.php/SBAMER/article/view/42>
- Harahap, S. S. (2017). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan (Cetakan Ke-1)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hulopi, A. K., Tuli, H., & Usman. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Koperasi di Kota Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i1.20>
- IAI. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Pertanggungjawaban Publik (SAK ETAP)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2019). *ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*. [https://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file\\_berita/DE\\_ISAK\\_35.pdf](https://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/DE_ISAK_35.pdf)
- IAI. (2023). *SAK ETAP akan digantikan oleh SAK Entitas Privat per 1 Januari 2025*. Ikatan Akuntan Indonesia. [https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Tentang\\_SAK\\_ETAP#gsc.tab=0](https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Tentang_SAK_ETAP#gsc.tab=0)
- Itsnaini, F. M. (2021). *Manfaat Koperasi Bagi Masyarakat, Anggota, dan Pelaku Usaha*. Detik.Com. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5559473/manfaat-koperasi-bagi-masyarakat-anggota-dan-pelaku-usaha>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2017). *Intermediate Accounting, Volume 1, IFRS Edition - Edisi Bahasa Indonesia* (T. Hidayat) (IFRS (Baha). Jakarta: Salemba Empat.
- Lohanda, D. (2017). The Influence of Education Level, Accounting Understanding, Financial Reporting Training on MSME Financial Reporting (Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan UMKM). *Prodi Akuntansi UNY*, 1, 1–20. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/13819/13344>
- Mulyati, M. (2020). Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada KPRI Pengayoman 1 Lepas Dompu. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(1), 225–238. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/449>

- Mursidah, S., & Nasution, J. (2022). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP pada Koperasi Tunas Wira Mandiri. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4044–4050. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/3497>
- Oktaritama, E. D., & Januarti, I. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Bagian Akuntansi Koperasi atas Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). *Indicators: Journal of Economic and Business*, 1(1), 65–72. <https://doi.org/10.47729/indicators.v1i1.54>
- Rudianto. (2019). *Akuntansi Koperasi (Edisi 2)*. Jakarta: Erlangga.
- Sekarwati, A. M. S., & Mazidah, N. (2018). Analisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan koperasi karyawan industri kemasan Semen Gresik (IKSG). *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, 14(1), 20–28. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/2104>
- Sinarwati, N. K., Herwati, N. T., Darmawan, N. A. S., & Ekawati, L. P. (2013). *Akuntansi Keuangan 1 (Berbasis IFRS)*. Undhiksa Press.
- Soesanto, S., & Rita, R. (2019). Analisis Perbandingan Pelaporan Keuangan Koperasi dengan Penerapan SAK ETAP. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi, dan Bisnis*, 8(1), 38–54. <https://ejurnal.swadharna.ac.id/index.php/kompleksitas/article/view/107>
- Subandi. (2015). *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wahyuni, N. R., Soegiarto, E., & Suroso, A. (2016). Penerapan Akuntansi Perkoperasian Menurut PSAK No.27 pada Koperasi Karyawan Pembangunan PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim Area Samarinda. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(1), 203–208. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/JMA/article/view/1749>
- Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J. E., Wahyuni, E. T., & Jusuf, A. A. (2017). *Pengantar Akuntansi 1—Adaptasi Indonesia (Edisi ke-4)*. Salemba Empat.